

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin cepat, isu ketahanan pangan menjadi sangat penting di seluruh dunia karena keterkaitan antara produksi pangan, rantai pasok, perubahan konsumsi, dan stabilitas sosial-ekonomi. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa peralihan pola konsumsi di Indonesia antara kawasan urban, rural dan hutan mencerminkan tantangan sistem pangan lokal di tengah tekanan global (Nurhasan et al., 2024).

Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, pemanfaatan dan stabilitas jangka panjang—dimana masyarakat pedesaan seringkali berada dalam posisi rentan karena keterbatasan sumber daya, infrastruktur dan pengaruh perubahan eksternal (Arifin & Sukmana, 2025).

Pada tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan cukup besar dalam mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan. Misalnya, analisis panel data 2019-2023 menunjukkan bahwa produksi beras, tingkat kemiskinan dan akses terhadap air bersih berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan Indonesia (Daulay & Arka, 2024).

Pemerintah Indonesia pun saat ini mendorong peran desa sebagai pilar ketahanan pangan nasional: desa diberi mandat untuk mengoptimalkan potensi lokal pangan sebagai respon terhadap tekanan global dan nasional (Pandigwati & Widiyanto, 2023).

Dalam konteks kebijakan, alokasi dana desa menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai contoh, penelitian di Sumatra menunjukkan efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan (Syarifudin et al., 2024).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan khususnya di sektor pertanian komoditas hortikultura atau tanaman pangan sekunder seperti jagung yang belum banyak dieksplorasi secara kuantitatif.

Di tingkat lokal, misalnya di Provinsi Sumatera Selatan (yang mencakup Kabupaten OKU), penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem pertanian terpadu di lahan rawa gambut (*peatlands*) untuk pangan lokal merupakan salah satu upaya penting dalam memperkuat kedaulatan pangan di daerah (Yuliana, 2024).

Fokus pada komoditas jagung menjadi penting karena jagung bukan hanya pangan (termasuk pakan) tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi petani kecil di pedesaan. Namun, tantangan seperti produktivitas rendah, akses ke pasar, dan efisiensi penggunaan dana program kerap membatasi potensi peningkatan pendapatan petani. Di Desa Suka Pindah, Kecamatan KPR, Kabupaten OKU, pemerintah desa melalui alokasi 20% dana desa untuk program ketahanan pangan mendapatkan perhatian sebagai strategi lokal untuk memperkuat basis ekonomi petani jagung.

Namun pengamatan awal di lapangan menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, belum ada data yang sistematis yang menggambarkan sejauh mana pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai rencana, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani jagung di desa ini.

Dari sisi sosial-ekonomi, petani jagung di desa tersebut menghadapi tantangan: pendapatan yang relatif rendah, fluktuasi harga, akses modal terbatas, serta kurangnya dukungan teknologi dan infrastruktur pertanian. Dampak ini dapat menimbulkan tekanan terhadap kesejahteraan petani: baik secara ekonomi (pendapatan, aset), sosial (level kehidupan, jaringan), maupun psikologis (ketidakpastian, stres ekonomi).

Secara budaya dan moral, ketidakmampuan petani dalam memaksimalkan program ketahanan pangan bisa menimbulkan ketidakadilan sosial di tingkat desa, dimana sebagian petani mungkin belum menerima manfaat secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program dan distribusinya secara adil.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa (Suhartono et al., 2022). Namun, penelitian tersebut sebagian besar bersifat kualitatif atau deskriptif, belum banyak yang menggunakan analisis kuantitatif secara sistematis untuk mengukur dampak langsung terhadap kesejahteraan petani jagung sebagai komoditas spesifik dalam konteks desa tertentu di Sumatera Selatan. Selain itu, sedikit penelitian yang mengevaluasi secara spesifik alokasi 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dan menghubungkannya dengan

variabel kesejahteraan petani jagung di desa-desa di Kabupaten OKU atau Kecamatan KPR secara empiris. Dengan demikian terdapat research gap: (1) kekurangan penelitian kuantitatif yang mengukur dampak pelaksanaan program dana desa 20% pada kesejahteraan petani jagung, (2) kurangnya konteks lokal di Kabupaten OKU/Desa Suka Pindah sebagai studi kasus spesifik, (3) belum banyak mengkaji pelaksanaan program (process evaluation) dan efek langsungnya terhadap kesejahteraan petani jagung.

Penelitian ini menjadi penting karena melalui evaluasi pelaksanaan program tersebut, dapat diketahui seberapa efektif instrument dana desa dapat mendukung petani jagung dalam meningkatkan kesejahteraan mereka—yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan wilayah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program ketahanan pangan dari alokasi 20% dana desa di Desa Suka Pindah, dan untuk mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan petani jagung. Manfaat penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah menambah literatur kuantitatif tentang pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan petani khusus komoditas jagung dan memperkaya studi evaluasi kebijakan desa. Secara praktik sosial, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa, dinas pertanian, dan lembaga pembangunan pedesaan dalam merancang penggunaan dana desa yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal Desa Suka Pindah tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam konteks

nasional penguatan ketahanan pangan melalui program dana desa dan pemberdayaan petani.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan yang bersumber dari alokasi 20% Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan petani, khususnya petani jagung di Desa Suka Pindah. Namun, efektivitas pelaksanaan program tersebut masih perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana program ini telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup petani.

Oleh karena itu, agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan terfokus, maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi dasar dalam proses analisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program ketahanan pangan yang didanai dari alokasi 20% Dana Desa di Desa Suka Pindah, Kecamatan KPR, Kabupaten OKU?
2. Berapa besar pendapatan petani jagung yang didanai dari alokasi 20% Dana Desa di Desa Suka Pindah, Kecamatan KPR, Kabupaten OKU setelah pelaksanaan?

## **C. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperlukan arah dan sasaran yang jelas agar penelitian ini memiliki fokus yang terukur serta dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis yang nyata. Oleh

karena itu, dalam bagian ini akan diuraikan tujuan penelitian yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

1. Menganalisis pelaksanaan program ketahanan pangan yang didanai dari alokasi 20% Dana Desa di Desa Suka Pindah, Kecamatan KPR, Kabupaten OKU.
2. Menghitung dan menganalisis besarnya pendapatan petani jagung setelah pelaksanaan program ketahanan pangan yang didanai dari alokasi 20% Dana Desa.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

1. **Akademis:** Memberikan kontribusi empiris dalam kajian agribisnis dan ekonomi perdesaan, khususnya terkait evaluasi kebijakan Dana Desa dan ketahanan pangan.
2. **Praktis:** Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan.
3. **Kebijakan:** Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pengelolaan Dana Desa di sektor pertanian.

